



# Diperiksa, Candra Dewi Nangis

## Sebagai Tersangka Kasus DKP Tabanan

**TABANAN** - Satu dari dua orang tersangka yang ditetapkan Kejari Tabanan dalam kasus dugaan pemerasan CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkab Tabanan mulai diperiksa. Dia adalah Candra Dewi (CD) yang juga Kasubag Hukum dan Kepegawaian di DKP. Saat diperiksa selama 7,5 jam oleh tim penyidik, Candra Dewi sempat meneteskan air mata, kemarin (3/6).

Dari pantauan koran ini, Candra

Dewi tiba di Kejari Tabanan sekitar pukul 09.30. Dia datang didampingi pengacaranya I Nyoman Nadayana. Candra Dewi kemudian digiring menuju aula kejar di lantai dua dan diperiksa oleh dua orang tim penyidik. Pemeriksaan Candra Dewi tergolong alot. Pasalnya, sejak diperiksa pukul 09.30, dia baru keluar dari kantor kejar sekitar pukul 17.00. Usai pemeriksaan tampak jelas raut mukanya kesal dan matanya sembab. Saat ditanya apakah Candra Dewi menangis? "Iya, Ibu (Candra Dewi) menangis terus," jawab Nadayana.

Sementara Candra Dewi hanya

mengangguk. "Saya ini kesal. Bukan takut. Kesal karena apa yang dituduhkan tidak saya lakukan dan tidak benar," ucap Candra Dewi.

Terkait materi pemeriksaan, dijelaskan Nadayana masih seputaran sistem rekrutmen tenaga kontrak di DKP, jumlah tenaga yang direkrut, bagaimana cara perekrutan termasuk kenapa ada yang tercecer. "Saya menilai kasus ini belum jelas, artinya masih *fity-fity* antara salah dan tidak. Karena akar masalah yang dituduhkan adalah pemerasan. Artinya, ada pemaksaan dan kekerasan di dalamnya," ungkapnya ■

► Baca **Diperiksa...** Hal 31

**Saya ini kesal. Bukan takut. Kesal karena apa yang dituduhkan tidak saya lakukan dan tidak benar."**

**Candra Dewi**  
Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP Tabanan



KETUT SUGINA/BALI EXPRESS

Edisi : Kamis, 4 Juni 2015

Hal : 21



Sambungan - - -

# Uang Rp 120 Juta Disebut Pinjaman

## ■ DIPERIKSA

Sambungan dari hal 21

Namun, dalam kasus ini, kata dia, tidak ada unsur kekerasan. Jadi, dugaan pemerasan itu menurutnya tidak terpenuhi. Begitu juga saat ditanya soal pungutan sejumlah uang kepada pegawai kontrak langsung dibantah Nadayana. Kata dia kliennya tidak ada meminta dan menerima sejumlah uang dari pegawai kontrak yang

dimaksud. "Klien saya tidak ada memungut dan menerima apalagi dengan paksaan tidak ada itu," ucapnya.

Namun, soal dua buah bukti kuitansi yang masing-masing bernilai Rp 60 juta atas nama Candra Dewi diakuinya sebagai sebuah pinjaman. "Soal uang Rp 120 juta, itu adalah pinjaman dari salah satu pegawai yang bernama Subagia, dan uang itu sudah dikembalikan," tegasnya. Sementara Kasipidsus Ke-

jari Tabanan Fathur Rohman membenarkan pihaknya telah memeriksa Candra Dewi sebagai tersangka untuk kali pertamanya. "Iya ini kali pertama CD (Candra Dewi) kita periksa sebagai tersangka," ucapnya. Soal materi pemeriksaan Fathur enggan mengungkapkannya. Yang jelas, kata dia, Candra Dewi ditanya sebanyak 41 pertanyaan oleh tim penyidik seputar dugaan pemerasan CPNS di lingkungan DKP.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Tabanan menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di lingkungan DKP. Kedua tersangka itu adalah I Gede Jagrem, mantan Kabid Peralatan dan Angkutan DKP yang kini menjadi Kabid Promosi dan Pengendalian di Disnaker dan Ni Nyoman Candra Dewi yang menjabat sebagai Kasubag Hukum dan Kepegawaian DKP. (gin/yes)

Edisi : Kamis, 4 Juni 2015

Hal : 31



## Radar Bali

# Hakim Perintahkan Tahan Tika dan Sujana

## Dalam Kasus Korupsi Dermaga Gunaksa

**DENPASAR** - Kasus Dermaga Gunaksa sepertinya akan merembet ke mana - mana. Kemarin (3/6), mantan Bupati Klungkung Wayan Candra menjadi saksi mahkota terhadap terdakwa Tim 9, yaitu Janapria dkk. Ternyata Candra

mengaku tidak pernah menerima dana yang disebutkan dari Plt Kadishub Wayan Tika dan Camat Dawan Wayan Sujana. Hakim akhirnya meminta jaksa agar menjadikan tersangka Tika dan Sujana. Bahkan, meminta agar ditahan.

Sidang ini dipimpin oleh kakim ketua Beslin Sihombing dengan terdakwa Ketut Janapria ■

► Baca **Hakim...** Hal 31



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

**BERSAKSI:** Mantan Bupati Klungkung Wayan Candra saat bersaksi pada sidang kasus Dermaga Gunaksa dengan terdakwa Ketut Janapria, I Made Ngurah, dan AA Sagung Mastini di Pengadilan Tipikor, kemarin.

Edisi : Kamis, 4 Juni 2015

Hal : 21



## Hari Ini, Penetapan Tersangka Bansos

**SEMARAPURA** - Sesuai rencana penyidik Sat Reskrim Polres Klungkung, bakal menggelar perkara kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pura Taman Sari, Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Kamis (4/6) hari ini. Gelar perkara tersebut, untuk memastikan status dugaan korupsi itu, apakah bisa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Ataukah malah ditutup, dengan alasan tidak cukup bukti, untuk menjerat pelaku. "Iya, itu sesuai rencana. Besok (hari ini) gelar perkara kasus itu," kata Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Bambang Gede Arta dihubungi Rabu (3/6). Dengan tegas, Bambang menjelaskan, ketika hasil gelar perkara hari ini cukup bukti meningkatkan status menjadi penyidikan, maka bakal ada pelaku atau tersangka, yang harus mempertanggungjawabkan dugaan korupsi bansos yang digelontorkan Pemprov Bali melalui APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 90 juta, itu. "Dari gelar perkara itu, akan kelihatan siapa saja pelakunya," ujar Bambang

kepada *Jawa Pos Radar Bali*, Rabu sore.

Sebagaimana diketahui, untuk mengusut dugaan korupsi bansos tersebut, penyidik Reskrim Polres Klungkung sudah memanggil sedikitnya 13 orang saksi. Di mana, salah satu saksi itu adalah Ketut Ngenteg, warga asal Banjar Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan. "Kalau yang diperiksa banyak. Tentunya pihak-pihak yang terkait dengan kasus itu. Saat gelar perkara, kan kelihatan siapa saja saksinya," tandas Bambang.

Informasi yang dirangkum koran ini, hasil penyelidikan polisi, bansos itu diduga disunat oknum sebesar Rp 61,5 juta dari total bansos sebesar Rp 90 juta. Hanya saja, Bambang menegaskan, hingga kemarin belum bisa memastikan kerugian negara dalam dugaan korupsi itu. Alasannya, dia belum menerima hasil audit BPKP. "Saya belum mendapat laporan dari penyidik, apakah hasil pemeriksaan BPKP sudah turun atau belum," pungkasnya. (wan/gup)

Edisi : Kamis, 4 Juni 2015

Hal : 25



## Hari Ini, Penetapan Tersangka Bansos

**SEMARAPURA** - Sesuai rencana penyidik Sat Reskrim Polres Klungkung, bakal menggelar perkara kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pura Taman Sari, Desa Bumbungan, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Kamis (4/6) hari ini. Gelar perkara tersebut, untuk memastikan status dugaan korupsi itu, apakah bisa ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Ataukah malah ditutup, dengan alasan tidak cukup bukti, untuk menjerat pelaku. "Iya, itu sesuai rencana. Besok (hari ini) gelar perkara kasus itu," kata Kasat Reskrim Polres Klungkung, AKP Bambang Gede Arta dihubungi Rabu (3/6). Dengan tegas, Bambang menjelaskan, ketika hasil gelar perkara hari ini cukup bukti meningkatkan status menjadi penyidikan, maka bakal ada pelaku atau tersangka, yang harus mempertanggungjawabkan dugaan korupsi bansos yang digelontorkan Pemprov Bali melalui APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 90 juta, itu. "Dari gelar perkara itu, akan kelihatan siapa saja pelakunya," ujar Bambang

kepada *Jawa Pos Radar Bali*, Rabu sore.

Sebagaimana diketahui, untuk mengusut dugaan korupsi bansos tersebut, penyidik Reskrim Polres Klungkung sudah memanggil sedikitnya 13 orang saksi. Di mana, salah satu saksi itu adalah Ketut Ngenteg, warga asal Banjar Pekandelan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan. "Kalau yang diperiksa banyak. Tentunya pihak-pihak yang terkait dengan kasus itu. Saat gelar perkara, kan kelihatan siapa saja saksinya," tandas Bambang.

Informasi yang dirangkum koran ini, hasil penyelidikan polisi, bansos itu diduga disunat oknum sebesar Rp 61,5 juta dari total bansos sebesar Rp 90 juta. Hanya saja, Bambang menegaskan, hingga kemarin belum bisa memastikan kerugian negara dalam dugaan korupsi itu. Alasannya, dia belum menerima hasil audit BPKP. "Saya belum mendapat laporan dari penyidik, apakah hasil pemeriksaan BPKP sudah turun atau belum," pungkasnya. (wan/gup)

Edisi : Kamis, 4 Juni 2015

Hal : 25



PREDIKAT WTP: Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (paling kanan) menerima predikat WTP dalam LHP BPK RI Perwakilan Bali, kemarin.

HUMAS PEMKAB BULELENG FOR RADAR BALI

## Untuk Kali Pertama Buleleng Dapat WTP

### Dalam LHP BPK RI Perwakilan Bali

**SINGARAJA** - Setelah dua tahun terakhir terus memperbaiki kinerja tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Buleleng akhirnya memetik hasil yang manis. Pemerintah Kabupaten Buleleng meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2014, yang dikeluarkan BPK RI Perwakilan Bali, Rabu (3/6) kemarin.

LHP dengan opini WTP itu diterima Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, didampingi Ketua DPRD Bule-

leng, Gede Supriatna. Upaya mendapatkan predikat WTP, itu telah dikejar Pemkab Buleleng sejak tahun 2012 silam. Dalam LHP atas audit LKPD tahun 2013, Pemkab Buleleng hanya berhasil meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, predikat WTP itu pertama kalinya diraih Pemkab Buleleng, sejak era otonomi daerah mulai dilakukan di Indonesia. Opini itu merupakan penantian panjang dan kerja keras seluruh perangkat dinas yang ada di Pemkab Buleleng, sehingga mampu melakukan tata kelola keuangan dengan baik ■

► Baca **Untuk...** Hal 31

Edisi : Kamis, 4 Juni 2015

Hal : 21



Sambungan - - -

## Tahun Lalu Dapat Predikat WDP

■ UNTUK

Sambungan dari hal 21

"Akhirnya apa yang kami cita-citakan sejak awal, sejak saya baru awal menjabat, bisa diraih. Ini bisa menjadi motivasi bagi kami di pemerintah, terus melakukan prinsip pemerintahan yang *clean government* dan *good governance*," kata Agus.

Menurut Agus, dalam upaya meraih opini WTP itu, pemerintah kabupaten selalu berkoordinasi dengan DPRD Buleleng dalam setiap program pembangunan yang dilakukan. Sehingga fungsi kontrol dari lembaga dewan tetap terjaga.

Sementara dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik itu melalui mekanisme penunjukan langsung dan tender, selalu melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Negeri Singaraja. Sehingga kekeliruan administrasi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, gugatan perdata, serta gugatan tata usaha negara, dapat ditekan seminimal mungkin.

"Setiap tahun kami perbaharui terus kerjasama antara pemerintah dengan kejaksaan, dan itu kami mulai dari tahun 2013. Sehingga

semua alur pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan aturan dan tidak menyebabkan aparat pemerintahan kami terkena masalah hukum," imbuh Agus.

Sementara itu Kepala BPK Perwakilan Bali Arman Syifa memberikan apresiasi khusus kepada komitmen Bupati Buleleng beserta jajarannya, dalam menata keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, dengan memberikan piagam penghargaan yang diserahkan langsung Kepada Bupati Buleleng.

Arman mengatakan, tak banyak kabupaten yang mampu melaksanakan tata kelola keuangan yang baik, seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Atas dasar itu, BPK memberikan apresiasi tinggi kepada Bupati Buleleng dengan jajarannya. Selain itu pemerintah juga menunjukkan itikad baik dan kerja keras menyelesaikan hal-hal yang dituangkan dalam temuan BPK.

"Ini wujud apresiasi BPK RI terhadap komitmen dan kerja keras dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng kami nilai melaksanakannya dengan sangat baik," kata Arman. (eps/yes)

Edisi : Kamis, 4 Juni 2015

Hal : 31



## Radar Bali

# WTP, Tabanan Pecah Telor

**TABANAN** - Setelah diganjar *disclaimer* oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengelolaan anggaran 2012 lalu. Tahun ini, Tabanan "pecah telor". Apa sebab? Dari disclaimer, selanjutnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tahun ini berhasil meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kepastian itu terungkap dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2014 di Kantor BPK RI Perwakilan Denpasar, yang langsung diterima Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, dari Ketua BPK Perwakilan Bali Arman Syifa, Rabu (3/6).

Seperti diketahui pengelolaan anggaran Tabanan tahun 2012 diganjar *disclaimer*. Pasca status memalukan itu Tabanan bergerak cepat melakukan pembenahan. Setahun kemudian yakni 2013 Tabanan mendapatkan opini WDP. Dan kini, setelah dua tahun melakukan upaya yang sama secara konsisten, opini itu tersebut



KETUT SUGINA/BALI EXPRESS

**SUMRIN-GAH:** Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti (tengah) saat menerima WTP dari BPK Perwakilan Bali.

terdongkrak menjadi WTP.

Di sela-sela penyerahan piagam WTP, Ketua BPK Perwakilan Bali Arman Syifa mengatakan pihaknya telah mempertimbangkan apa yang telah dilaksanakan Pemkab Tabanan selama dua tahun terakhir. Dari hasil evaluasi tersebut, tidak sedikit perkembangan yang telah dicapai dari sisi pengelolaan anggaran. Dan, hal ini ditunjang respons cepat Pemkab Tabanan dalam menindaklanjuti setiap temuan dari

hasil pemeriksaan selama dua tahun terakhir. "Kami telah melakukan evaluasi dan melihat banyak perkembangan yang signifikan. Ini menjadi dasar penilaian kami. Sehingga kami memberikan opini yang lebih yaitu WTP," ujar Arman. Atas opini tersebut Bupati Eka mengungkapkan rasa syukurnya. Baginya, ini merupakan kado istimewa bagi kepemimpinan Eka Jaya yang sebentar lagi akan berakhir pada Agustus 2015 mendatang. (gin/gup)

Edisi : Kamis, 4 Juni 2015

Hal : 25